

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi merupakan tujuan utama yang penting untuk dicapai bagi seluruh negara di dunia khususnya bagi negara berkembang, yang mana pembangunan ekonomi dilakukan untuk mencapai kesejahteraan dan Kemampuan sosial masyarakat yang maju di setiap negara. Dalam beberapa tahun terakhir pembangunan ekonomi telah menjadi fokus utama dan menjadi salah satu indikator ukuran pencapaian dari keberhasilan pembangunan disemua negara. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dari Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang mana merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Berkurangnya Kesenjangan termasuk salah satu *Goal* baru yang disepakati bersama pada agenda SDGs. *Goal* atau tujuan ini terdapat pada tujuan nomor 10 yaitu Penurunan Kesenjangan dalam dan antar negara. *Goal* baru ini disepakati karena secara global masalah kesenjangan di masyarakat di berbagai aspek masih cukup tinggi, baik itu di negara berkembang maupun negara maju (Alisjahbana & Murningtyas, 2018). Kaldor (1970) menyatakan bahwa ketimpangan adalah masalah ekonomi regional yang belum terpecahkan. Berbagai wilayah tumbuh dengan tingkat yang beragam dan tak sama, beberapa wilayah bahkan tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah lainnya (Ratih A. , 2016).

Ketimpangan Pembangunan antar wilayah merupakan salah satu bentuk masalah yang muncul dikarenakan implementasi otonomi daerah yang kurang terlaksana dengan baik. Menurut Douglas C. North (1955) yang menemukan permasalahan mengenai ketimpangan pembangunan dalam analisisnya mengenai teori pertumbuhan Neo-Klasik, menyatakan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hubungan tersebut adalah ketika pada masa awal proses pembangunan suatu negara akan terjadi ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cenderung selalu mengalami peningkatan. Proses tersebut akan terus berlangsung hingga tingkat ketimpangan negara yang yang dimaksud mencapai titik puncak. Setelah hal tersebut

terjadi maka saat proses pembangunan kembali berlanjut, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan mulai mengalami penurunan (Sastra, 2017).

Ketimpangan pembangunan antar wilayah diketahui dengan melihat perkembangan ekonomi wilayah itu sendiri dengan melihat data Laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Perkembangan ekonomi dilihat dengan Laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diketahui dengan melihat angka Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut, sedangkan untuk laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut (Nurchahyo, 2021).

Berikut merupakan peringkat sepuluh besar provinsi di Indonesia dengan tingkat ketimpangan tertinggi pada tahun 2021 di Indonesia yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 10 besar Provinsi dengan Tingkat Ketimpangan Tertinggi di Indonesia menurut Gini Rasio tahun 2014 hingga 2021

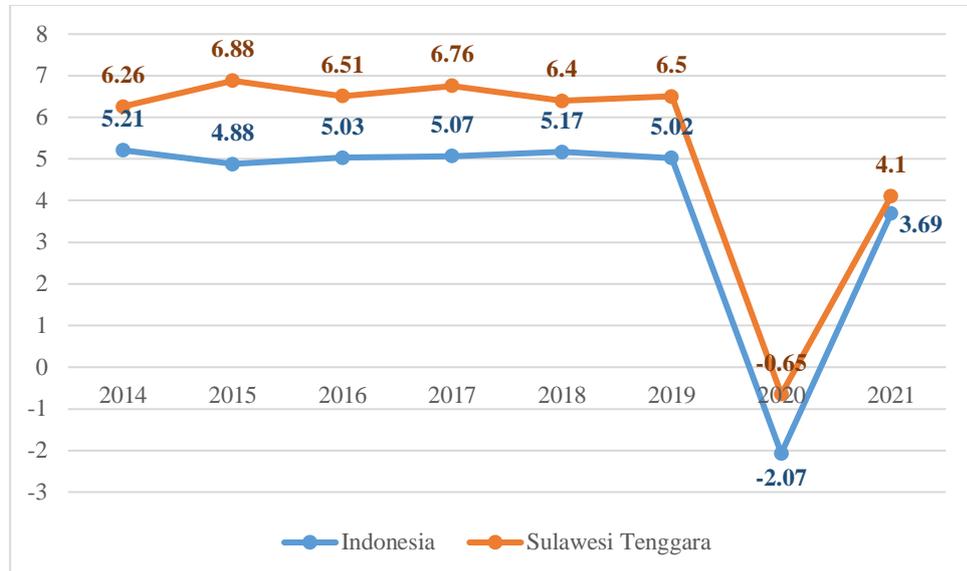
No	Provinsi	Rata-rata Gini Rasio
1	DI Yogyakarta	0,43
2	Gorontalo	0,413
3	DKI Jakarta	0,408
4	Jawa Barat	0,405
5	Sulawesi Selatan	0,403
6	Papua	0,4
7	Sulawesi Tenggara	0,395
8	Papua Barat	0,395
9	Jawa Timur	0,384
10	Sulawesi Utara	0,3765

Sumber : BPS Indonesia, (2022)

Menurut data diatas yang berasal dari Badan Pusat Statistik Indonesia, berdasarkan data tersebut Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi di Indonesia, menempati peringkat ke tujuh dari total 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2014 hingga tahun 2021. Sedangkan di Pulau Sulawesi berada di peringkat ketiga tertinggi berada dua tingkat dibawah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan. Namun demikian, di Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi,

namun provinsi ini juga memiliki masalah ketimpangan antarwilayah. Hal ini ditunjukkan pada Grafik dibawah ini.

Gambar 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Nasional Tahun 2014 – 2021



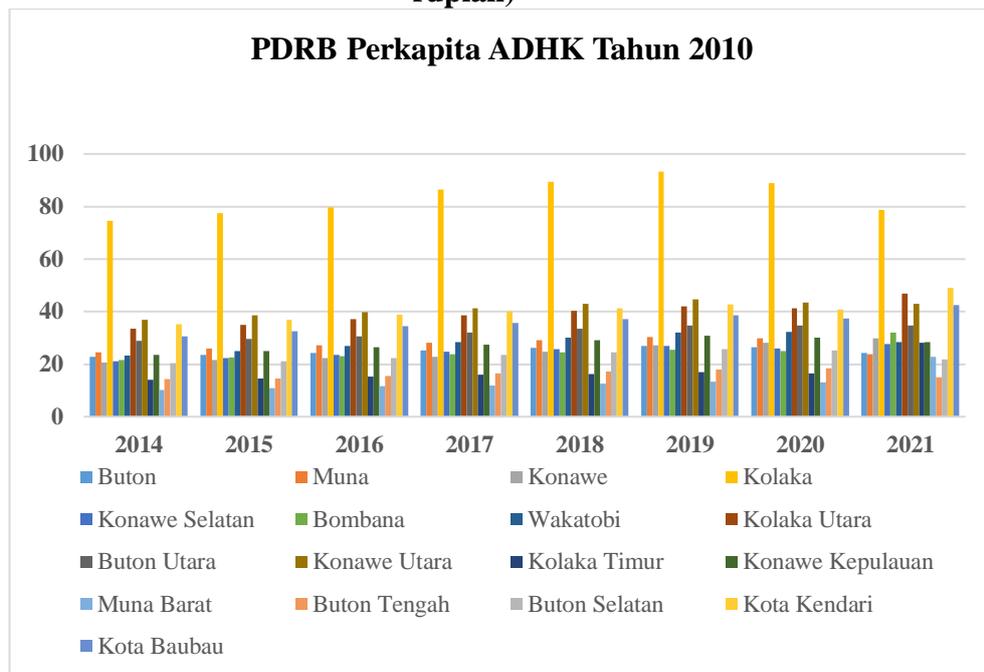
Sumber : BPS (data diolah)

Pada Gambar 1 menyajikan data mengenai Laju Pertumbuhan PDB Indonesia dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2014 hingga 2021. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 – 2021 cenderung berada diatas Pertumbuhan ekonomi Nasional. Jika dilihat data tersebut maka menunjukkan *Gap* antara Nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara selalu berada diatas 1 % selama kurun waktu tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi perkembangan ekonomi di Sulawesi Tenggara selama tujuh tahun terakhir selalu terjaga pada status yang cukup tinggi. Dengan tingginya laju pertumbuhan ekonomi tersebut maka dapat diartikan bahwa pembangunan telah memberikan dampak yang baik pada pertumbuhan ekonomi dan dapat dianggap tujuan pembangunan ekonomi berhasil tercapai.

Menurut Arsyad (2005), mengklaim bahwa kesenjangan regional dalam tingkat pembangunan ekonomi mengakibatkan variasi regional dalam tingkat kesejahteraan.. Keberhasilan Pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara tidak terlepas dari pertumbuhan yang positif dari Kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Pertumbuhan tersebut dapat terlihat dari tingkat kesejahteraan antar wilayah. Tingkat kesejahteraan antar wilayah dapat diketahui dengan melihat besaran pendapatan

perkapita. Hal ini dimaksudkan karena pendapatan per kapita dapat dihitung secara teoritis dengan membagi pendapatan suatu daerah dengan seluruh penduduknya. Akibatnya, pendapatan per kapita memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan suatu wilayah. (Destiningsih, Achsa, & Sugiharti, 2019).

Gambar 2. PDRB atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 – 2021 (dalam juta rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (Data diolah)

Berdasarkan grafik pada gambar 1 yang menunjukkan grafik, terlihat bahwa PDRB Perkapita yang diperoleh berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara selama sepuluh tahun terakhir mengalami peningkatan yang stabil. Dengan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 - 2021 adalah sebesar 5,345%. Namun, pertumbuhan PDRB Perkapita tersebut tidak menunjukkan adanya kesetaraan antara PDRB Kabupaten/kota satu dengan lainnya. Selisih antara PDRB perkapita tertinggi dengan PDRB perkapita rendah (Range PDRB perkapita) yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara sangat berbeda. Range PDRB perkapita Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 64,34 Juta Rupiah. Kemudian pada tiga tahun setelahnya yaitu tahun 2017, Range PDRB perkapita di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah 74,5 Juta Rupiah. Pada Tahun 2019 mencapai angka tertinggi yaitu dengan Range PDRB perkapita sebesar 80,08 Juta Rupiah. Lalu yang terbaru adalah tahun 2021, dimana Range PDRB perkapita adalah sebesar 63,63 Juta Rupiah. Pada

tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan dikarenakan oleh adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia sehingga perekonomian mengalami penurunan. Selain karena hal tersebut, data menunjukkan bahwa terdapat range yang besar antara daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Fenomena ini menunjukkan masih tingginya disparitas kekayaan per kapita antara kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berdampak pada pembangunan daerah.

Proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh ketimpangan wilayah, dan dampak ini dapat menguntungkan dan merugikan. Inefisiensi ekonomi, melemahnya kohesi sosial dan solidaritas, dan biasanya ketidaksetaraan dipandang sebagai semacam ketidakadilan adalah beberapa dampak buruk yang diakibatkannya. Kabar baiknya, akibat disparitas wilayah, suatu wilayah akan berupaya memperkuat perekonomiannya dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan wilayah (Saragih & Simanullang, 2017). Untuk menurunkan besarnya disparitas antar wilayah, perlu dilakukan kajian untuk mengevaluasi potensi wilayah agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka diperlukan adanya penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau gagasan untuk menurunkan atau meminimalisir semakin besarnya Ketimpangan Pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal-hal yang Melatarbelakangi penelitian dengan judul “Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara”.

I.2 Perumusan Permasalahan

Disparitas Pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara selama tujuh tahun terakhir selalu mengalami peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara yang cukup tinggi bahkan selalu berada 1 % diatas pertumbuhan nasional tidak mendorong terjadinya penurunan pada tingkat ketimpangan pembangunan ekonomi wilayah tersebut. Selain itu, tingginya perbedaan atau *range* tiap PDRB Perkapita antara Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara yang menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan memberikan gambaran tentang ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perbedaan jumlah penduduk yang tinggal di setiap wilayah sehingga menyebabkan perbedaan pendapatan setiap masyarakat antar wilayah. Untuk

mengetahui tingkat disparitas perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara maka dapat diketahui dengan mengukur menggunakan beberapa Teknik Analisa seperti Indeks Williamson dan Tipologi Klasen. Lalu dilakukan beberapa analisa untuk mengatasi ketimpangan tersebut yaitu analisa potensi wilayah seperti Analisis *Shift-Share* dan *Location Quotient*. Berdasarkan hal tersebut maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana Disparitas Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 – 2021 menurut pendekatan Indeks Williamson ?
2. Bagaimana Klasifikasi Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 – 2021 menurut Analisa Tipologi Klassen?
3. Bagaimana potensi wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Analisa *Shift-Share* dan *Location Quotient*?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Disparitas Pembangunan Ekonomi Provinsi Sulawesi , Tenggara pada tahun 2014 – 2021 menurut perhitungan Indeks Williamson.
2. Untuk mengetahui Klasifikasi Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2014 – 2021 menurut Analisa Tipologi Klassen.
3. Untuk mengetahui bagaimana potensi wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara menurut Analisa *Shift-Share* dan *Location Quotient*.

I.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut :

I.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan mengenai Disparitas Pembangunan Ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara serta bagaimana potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan dan mendorong penurunan ketimpangan, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya. Serta dapat menjadi sarana dalam mengembangkan Pemahaman selama pembelajaran di Perkuliahan.

I.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan Disparitas Pembangunan Ekonomi serta bagaimana potensi yang dimiliki untuk dapat dikembangkan dan mendorong penurunan ketimpangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Bagi Penulis

Merupakan suatu pembelajaran serta Kesempatan dalam mengalisi Disparitas Pembangunan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan Penelitian ini pula, penulis mendapat kesempatan untuk menggunakan teori yang selama ini dipelajari di Bangku Kuliah.